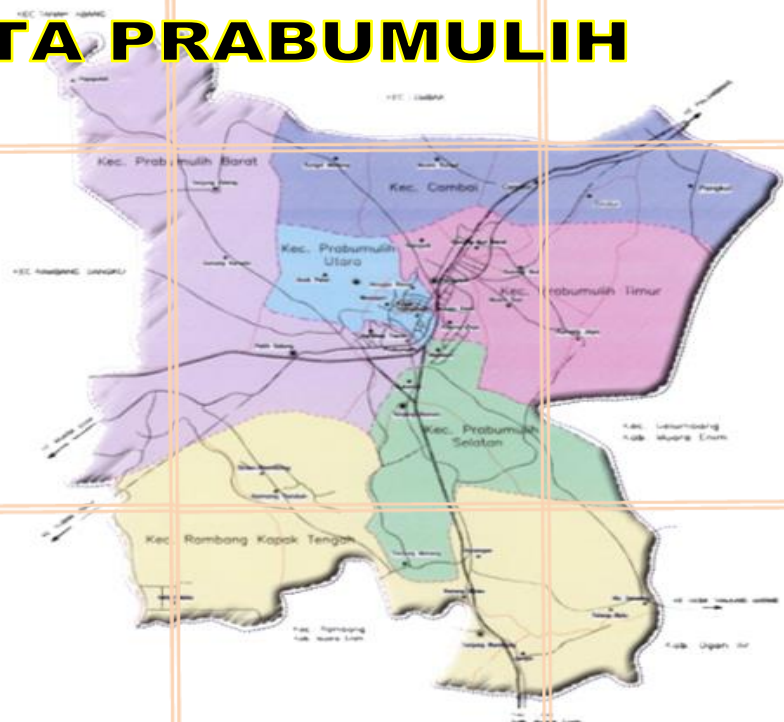




PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

RENCANA KERJA TAHUN 2025

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PRABUMULIH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan nasional diatur dengan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana tahapan dan tata cara penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2025 ini memuat program dan kegiatan untuk tahun 2025, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan (comon goals) dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2025 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam RKPD Kota Prabumulih Tahun 2025 dan merupakan salah satu acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025. Proses penyusunan Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja OPD

Anggota Tim Penyusunan Renja OPD merupakan pejabat dan staf OPD yang benar-benar sipa dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja OPD.

b. Orientasi mengenai Renja OPD

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja OPD, hubungan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penetapan dan pengarsipan dokumen Renja. Agenda kerja ini dapat dibuat dalam bentuk bagan alir.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

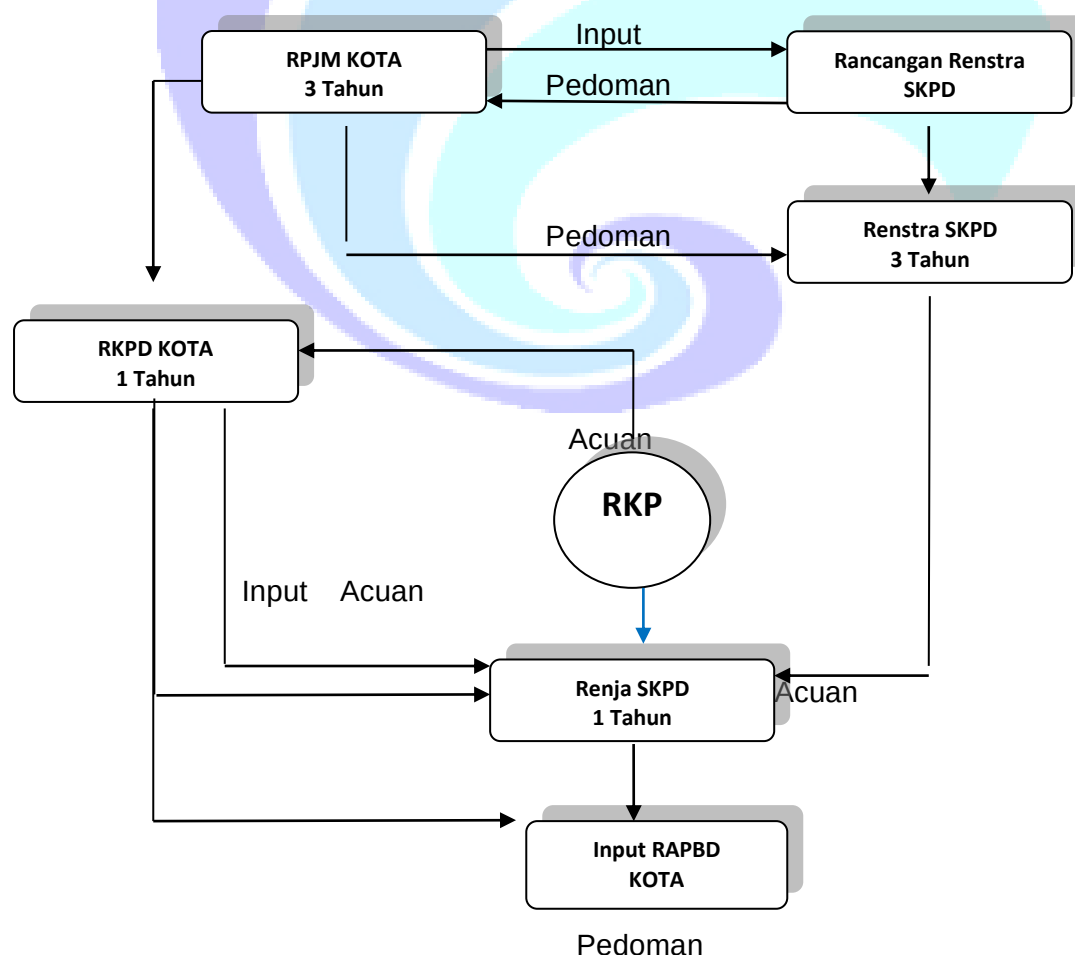
Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja OPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulkan data atau informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Berikut Gambaran Mengenai Keterkaitan RPJMD, Renstra KL, Renstra PD provinsi dan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1

Gambaran Mengenai Keterkaitan RPJMD, Renstra KL, Renstra PD provinsi dan Renja



Sumber : Renstra

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen perencanaan PD untuk 1 (satu) tahun. Dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) PD tersebut, harus berpedoman pada :

1. Renja PD harus Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (2024-2026)
2. Renja PD harus berpedoman pada hasil Evaluasi perangkat Daerah tahun Lalu (2023)
3. Renja PD harus berpedoman pada hasil evaluasi Perangkat Daerah tahun berjalan (2024)
4. Rancangan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan format dan sistematika yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dibentuk dengan pertimbangan agar pelaksanaan desentralisasi sebagian wewenang di bidang Komunikasi dan Informatika lebih optimal dengan mengacu pada seluruh potensi yang ada. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas desentralisasi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. Pelaksanaan tugas lain di bidang komunikasi dan informatika yang disahkan oleh Walikota.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Prabumulih(lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113) ;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan Pengelolaan TAnggung JAwb Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Walikota Nomor 40 TAHUN 2014 tentang sisitem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemrintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih TAHUN 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan nomenklalur perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika
10. Peraturan Menteri dalam negeri republik indonesia Nomor : 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023-2026
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 mempunyai maksud dan tujuan untuk dicapai dalam 1 tahun kedepan, berikut dijabarkan maksud dan tujuan tersebut.

1.3.1 Maksud

Maksud dari Renja Dinas Komunikasi dan Informatika kota Prabumulih adalah Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan KIP,TIK dan Persandian statistik untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang akan telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang TIK,KIP dan Statistik Persandian (Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025),
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang TIK,KIP dan Statistik Persandian,
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2025

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025, mengacu pada APBD tahun 2024 yang seharusnya pada waktu penyusunan renja-PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja - PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayan dasar PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampak terhadap pencapaian visi-misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional atau internasional, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal PD dengan hasil analisis, penjelasan mengenai alasan proses tersebut, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses dan catatan penting terhadap perbedaan rancangan awal PD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Menguraikan hasil kajian penjelasan tentang proses bagaimana usulan program atau kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

3.3. Program dan Kegiatan

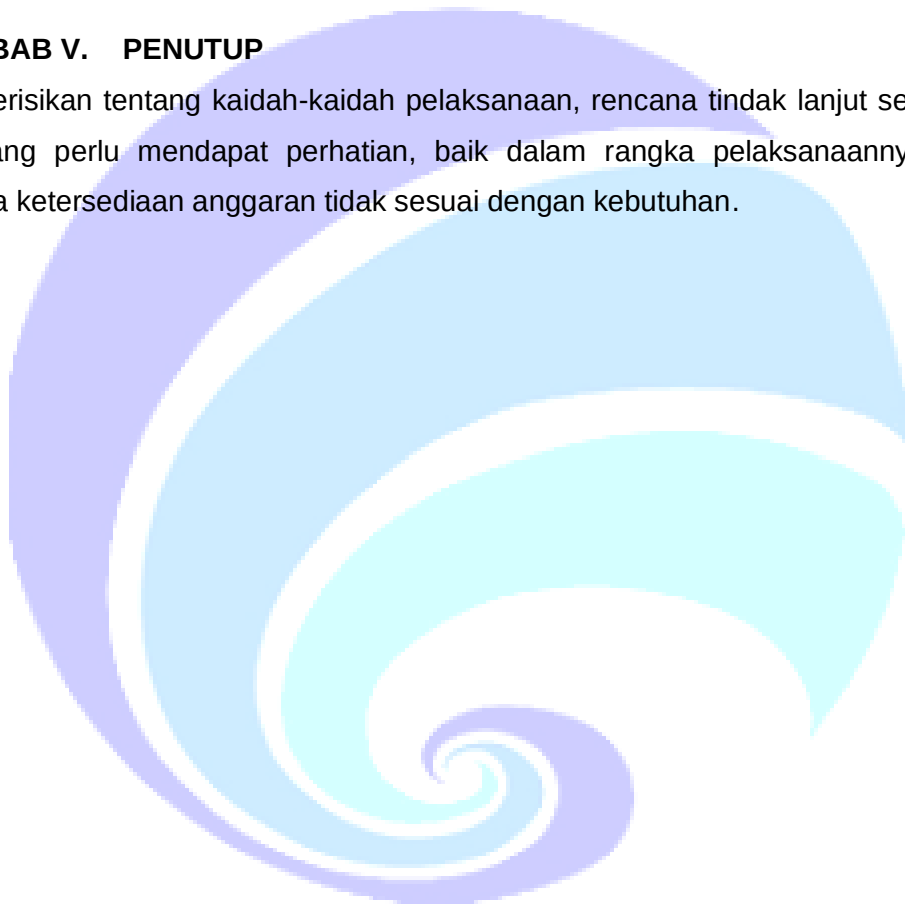
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan beserta rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program atau kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang rencana kerja pada tahun 2025 dan pendanaan kinerja sesuai APBD tahun sihkannya rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota prabumulih.

BAB V. PENUTUP

Berisikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut serta catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Diskominfo Kota Prabumulih Tahun 2023 menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Berbagai upaya dan kemajuan yang dicapai tersebut dapat direalisasikan dengan penekanan pada penggunaan anggaran yang maksimal, namun pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan telah terealisasi **95,03 %** dengan pencapaian penggunaan anggaran mencapai 100% hasil yang telah dicapai dimaksud tidak mengurangi standarisasi pekerjaan baik secara kualitas maupun kuantitas sasaran yang telah direncanakan Tahun 2023. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran Belanja sebesar Rp.7.314.981.616.- yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 6.957.966.616.- dan Belanja Modal sebesar Rp. 357.015.000.-

Tabel 2 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung tahun 2023 yaitu :

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE		CAPAIAN KINERJA
				FISIK	KEUANGAN	
1	2	3	4	5	6	7
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.514.981.616	6.937.236.170	92,31	92,31	
2.16 2.16.16 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.965.190.622	2.510.735.954	84,67	84,67	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16 2.16.16 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.185.000	9.185.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.185.000	2.185.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.133.141.672	1.740.619.514	81,60	81,60	
2.16 2.16.16 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.075.204.672	1.682.682.514	81,09	81,09	
2.16 2.16.16 1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.280.000	53.280.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.157.000	2.157.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.200.000	19.200.000	76,19	76,19	
2.16 2.16.16 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.200.000	19.200.000	76,19	76,19	

2.16 2.16.16 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.174.000	24.455.000	97,14	97,14	
2.16 2.16.16 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.174.000	24.455.000	97,14	97,14	
2.16 2.16.16 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.649.950	349.891.140	90,03	90,03	
2.16 2.16.16 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.273.850	50.485.000	75,04	75,04	
2.16 2.16.16 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.970.000	19.606.300	98,18	98,18	
2.16 2.16.16 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.179.100	4.153.000	27,36	27,36	
2.16 2.16.16 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.745.000	5.395.000	36,59	36,59	
2.16 2.16.16 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	17.000.000	16.987.500	99,93	99,93	
2.16 2.16.16 1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.982.000	248.764.340	99,51	99,51	
2.16 2.16.16 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.000.000	274.380.000	99,41	99,41	
2.16 2.16.16 1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	276.000.000	274.380.000	99,41	99,41	
2.16 2.16.16 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	
2.16 2.16.16 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.040.000	91.205.300	86,01	86,01	
2.16 2.16.16 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	106.040.000	91.205.300	86,01	86,01	
2.16 2.16.16 2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.269.727.000	3.193.305.500	97,66	97,66	Tersedianya Informasi dan Komunikasi Publik
2.16 2.16.16 2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.269.727.000	3.193.305.500	97,66	97,66	
2.16 2.16.16 2.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	35.000.000	32.585.000	93,10	93,10	
2.16 2.16.16 2.2.01.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	5.100.000	4.925.000	96,57	96,57	
2.16 2.16.16 2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	112.238.000	103.684.500	92,38	92,38	
2.16 2.16.16 2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2.843.000.000	2.780.050.000	97,79	97,79	
2.16 2.16.16 2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	74.389.000	73.579.000	98,91	98,91	
2.16 2.16.16 2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	200.000.000	198.482.000	99,24	99,24	
2.16 2.16.16 3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.135.953.994	1.093.430.796	96,26	96,26	Tersedianya Aplikasi Informatika
2.16 2.16.16 3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	947.913.994	931.128.908	98,23	98,23	
2.16 2.16.16 3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	947.913.994	931.128.908	98,23	98,23	

2.16 2.16.16 3.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	188.040.000	162.301.888	86,31	86,31	
2.16 2.16.16 3.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	29.740.000	28.904.100	97,19	97,19	
2.16 2.16.16 3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE (DINAS KOMUNIKASI DAN	20.000.000	14.002.000	70,01	70,01	
2.16 2.16.16 3.2.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	8.300.000	5.231.788	63,03	63,03	
2.16 2.16.16 3.2.02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	120.000.000	105.409.000	87,84	87,84	
2.16 2.16.16 3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	10.000.000	8.755.000	87,55	87,55	
2.20 2.16.16 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	29.110.000	26.694.000	91,70	91,70	Terselenggaranya statistik sektoral
2.20 2.16.16 2.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.110.000	26.694.000	91,70	91,70	
2.20 2.16.16 2.2.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	29.110.000	26.694.000	91,70	91,70	
2.21 2.16.16 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	115.000.000	113.069.920	98,32	98,32	terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi
2.21 2.16.16 2.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	113.069.920	98,32	98,32	
2.21 2.16.16 2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	50.000.000	49.015.500	98,03	98,03	
2.21 2.16.16 2.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	
2.21 2.16.16 2.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	59.054.420	98,42	98,42	

Tabel 2 Realisasi fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2023

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	Dinas Kominfo	5 Program/ 13 Kegiatan/ 31 Sub Kegiatan	7.314.981.616	6.951.617.170	95,03	95,03

Evaluasi dimaksud dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam perencanaan strategis yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja sebagaimana tersebut pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Realisasi Renstra tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026						
				target Akhir RENSTRA (2023)	TAHUN 2022			Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(8/7b)	10a	10b
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			Rp 2.937.298.561	Rp 2.481.472.550	84,48			Rp 3.493.359.672
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu	%	100%	100%	Rp 7.000.000	Rp 6.859.000	97,98571429	100%	Rp 25.000.000
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan LAKIP	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7.000.000	Rp 6.859.000		1 Dokumen	Rp 10.000.000
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%			Rp 1.860.680.561	1.777.714.341	95,54		Rp 2.236.614.672
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji Dan Tunjangan ASN	Tahun	1 Tahun	1 Tahun	Rp 1.835.480.561	1.752.514.341	95,48	1 Tahun	Rp 2.175.204.672
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 25.200.000	Rp 25.200.000	100	12 Bulan	Rp 53.410.000

2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	Rp	4.000.000		
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	Rp	4.000.000		
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%			Rp	25.200.000	Rp	22.700.000	90,07936508	Rp	25.200.000	
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanannya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp	25.200.000	Rp	22.700.000	90,07936508	12 Bulan	Rp	25.200.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%			Rp	25.182.000	Rp	20.182.000	80,14	Rp	60.000.000	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	Stel	50 stel	50 stel	Rp	25.182.000	Rp	20.182.000	80,14	50 stel	Rp	60.000.000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan								
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%			Rp	600.066.000	Rp	582.192.970	97,02		Rp	699.745.000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kegiatan	1 Keg	1 Keg				(pengadaan Drone, 2 Laptop,2 PC, Printer,2 scan, 3 Lemari besi)	Rp	150.000.000		
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp	9.994.000	Rp	9.944.200	99,50	12 Bulan	Rp	35.000.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Cetakan	5 Jenis Cetakan	5 Jenis Cetakan	Rp	20.006.000	Rp	17.328.000	86,61	5 Jenis Cetakan	Rp	30.000.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baca Perundang-undangan	Surat Kabar	5 Surat Kabar	5 Surat Kabar	Rp	10.000.000	Rp	9.201.000	92,01	5 Surat Kabar	Rp	14.745.000
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Materai	Jenis ATK	50 jenis ATK	50 jenis ATK	Rp	40.066.000	Rp	39.026.000	97,40	50 jenis ATK	Rp	40.000.000
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp	20.000.000	Rp	19.827.300	99,14	12 Bulan	Rp	30.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Rp	500.000.000	Rp	486.866.470	97,37	12 Bulan	Rp	400.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%			Rp	346.330.000	Rp	-	-		Rp	120.000.000

2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1 unit	1 unit	Rp 346.330.000		-	4 unit (Motor)	Rp 120.000.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100,00	100%	Rp 1.800.000
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai untuk Kegiatan Jasa Surat Menyurat	Materai	300 materai	300 materai	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100,00	300 materai	Rp 1.800.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			Rp 71.040.000	Rp 70.024.239	98,57	100%	Rp 325.000.000
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang terpeliharaan ,Kendaraan yang Kena Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan	6 kendaraan	6 kendaraan	Rp 71.040.000	Rp 70.024.239	98,57	7 kendaraan	Rp 275.000.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tahun	Pemeliharaan Peralatan kantor (AC, Laptop dll)	1 Tahun				Pemeliharaan Peralatan kantor (AC, Laptop dll) 1 Tahun	Rp 50.000.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan Pelayanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik	%			Rp 2.518.082.940	Rp 2.501.165.626	99,33	100%	Rp 2.475.000.000
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%			Rp 2.518.082.940	Rp 2.501.165.626	99,33	100%	Rp 2.475.000.000
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan PPID Kota Prabumulih dan Laporan S4AN)	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 5.000.000	Rp 3.642.000	72,84	2 Kegiatan	Rp 100.000.000
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Jumlah Kegiatan Desmininasi /Colling Masyarakat)	%	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 5.000.000	Rp 4.950.000	99,00	1 kegiatan	Rp 30.000.000

2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Jumlah Kegiatan Website)	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 19.999.940	Rp 19.613.000	98,07	2 Kegiatan (website+pameran)	Rp 70.000.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik(Jumlah Kegiatan Jasa Advetorial)	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 2.217.090.000	Rp 2.202.677.886	99,35	1 Kegiatan	Rp 2.000.000.000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Jumlah Kegiatan Cetak PKK)	Kegiatan/edisi	1 Kegiatan/ 4 edisi	1 Kegiatan/ 4 edisi	Rp 66.000.000	Rp 66.000.000	100,00	1 Kegiatan / 4 edisi	Rp 25.000.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kegiatan Layanan Hubungan Media (Jumlah Kegiatan Orientasi /Bimtek Wartawan)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 200.000.000	Rp 199.690.740	99,85	1 kegiatan	Rp 250.000.000
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 4.993.000	Rp 4.592.000	91,97		
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Aplikasi Informatika	%			Rp 1.425.108.000	Rp 1.052.274.963	73,84		Rp 1.344.159.192
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%			Rp 1.129.104.000	Rp 791.233.963	70,08		Rp 1.164.159.192
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 1.129.104.000	Rp 791.233.963	70,08	12 Bulan	Rp 1.164.159.192
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%			Rp 296.004.000	Rp 261.041.000	88,19		Rp 180.000.000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan	
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah (Kegiatan Perawatan Jaringan)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 5.001.000	Rp 2.601.000	52,01	12 Bulan	Rp 50.000.000

2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Kegiatan Colocation Sever LPSE)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			#DV/0!		
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan Informasi Elektronik (sosialisasi dan Quick Count)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 24.398.000		-	1 kegiatan	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 216.000.000	Rp 216.000.000	-	1 kegiatan	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (Kegiatan Pengawasan Menara)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00	1 kegiatan	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (tersedianya Peserta Penyedia Barang dan Jasa untuk Sosialisasi Standarisasi LPSE kepada Penyedia)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0	-	-		
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (CGIO)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 15.000.000	Rp 14.184.000	94,56	12 Bulan	Rp 70.000.000
2	16	03	2.02	12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Sosialisasi SPBE	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 25.605.000	Rp 18.256.000	71,30	12 Bulan	Rp 60.000.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Data/Informasi Statistik Daerah	%			Rp 25.384.000	Rp 15.157.500	59,71		Rp 50.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	%			Rp 25.384.000	Rp 15.157.500	59,71		Rp 50.000.000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Kegiatan Metadata Statistik Sektoral (Kegiatan Statistik)	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 25.384.000	Rp 15.157.500	59,71	1 Kegiatan yaitu : Kegiatan Data (dokumen) Prabumulih Dalam Angka	Rp 50.000.000

2	20	02	2.01	02	peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu statistik daerah yang intergrasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Kegiatan Sosialisasi Satu Data)								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	%			Rp 110.000.000	Rp 93.377.000	84,89		Rp 180.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%			Rp 110.000.000	Rp 93.377.000	84,89		Rp 180.000.000
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Rp 50.000.000	Rp 36.142.000	72,28	1 kegiatan	Rp 50.000.000
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Keamanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			-	1 kegiatan DAN 3 X PELATIHAN	Rp 70.000.000
2	21	02	2.01	05	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang yang distrelisasi oleh Dinas Kominfo pada Pemerintahan Kota Prabumulih (Jumlah Area Tingkat keamanan informasi pemerintah)	Ruang	14 Ruang	14 Ruang	Rp 60.000.000	Rp 57.235.000	95,39	14 Ruang	Rp 60.000.000
										Rp 7.015.873.501	Rp 6.143.447.639	87,56		Rp 7.542.518.864

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana jenis indikator yang dikaji menurut Tugas dan fungsi Diskominfo yang terkait dengan kinerja pelayanan Bidang komunikasi dan informatika yaitu :

1. Dokumen yang dihasilkan oleh Diskominfo adalah Rencana Kerja (Renja) PD, Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU PAPBD) serta PPAS Perubahan.
2. Keberadaan dokumen perencanaan di bidang komunikasi dan informatika yang dimiliki Dishubkominfo sudah cukup memadai dengan memiliki dokumen Renstra, Renja PD, dan RKA.
3. Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam Renja Diskominfo hampir secara keseluruhan tidak ada, hal ini seluruh program sudah masuk kedalam penyusunan program RKPD.
4. Sedangkan masih ada Program Renja PD yang tidak terakomodir di dalam RKA Diskominfo, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan dalam pengalokasian pendanaan.

Program/kegiatan yang tertaung dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan informatika kota prabumulih tahun 2023 sebagian besar merupakan kelanjutan dari program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika tahun 2021-2023 serta sebagian lagi merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Prabumulih tahun 2018-2023.

Berdasarkan peraturan daerah kota prabumulih nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota prabumulih dan undang-undang nomor 6 tahun 2001 tentang pembentukan kota prabumulih selanjutnya sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD disampaikan IKU (Indikator kinerja utama) ,SPM (Standar Pelayanan minimal),MDGS (millenium development goals) dan IKK (Indikator kinerja kunci) diambil dari target RENSTRA dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025
KOTA PRABUMULIH**

No	Indikator (IKU,SPM,IKK)	Angka/Nilai Target/Standar (IKU/SPM/IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Indikator Sasaran Pada Renstra										
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan PD		B	A	A	A	B	A	A	A	
3	Terjangkaunya Akses Komunikasi dan Informatika		100	100	100	100	90	90	100	100	
4	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Tekonologi Informasi dan Komunikasi Publik		100	100	100	100	99	99	100	100	
5	Meningkatnya Kinerja Sistem Persandian Daerah		100	100	100	100	92	92	100	100	
6	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral		100	100	100	100	100	100	100	100	
B	Program/Kegiatan/sub kegiatan										
1	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1	1	1	2	1	1	1	2	

3	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD		1	1	1	1	1	1	1	1	
4	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan LAKIP		1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Persentase Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Terlaksananya Gaji Dan Tunjangan ASN		100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	1	1	1	1	1	1	1	
10	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD		1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	100	100	100	61	61	100	100	
3	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan		100	100	100	100	99	99	100	100	
3	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi		100	100	100	100	90	11	100	100	
1	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	80	76	100	100	
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		100	100	100	100	97	97	100	100	
4	Tersedianya Bahan Baca Perundang-undangan		100	100	100	100	100	77	100	100	
1	Tersedianya Bahan/Materai		100	100	100	100	100	100	100	100	

2	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	100	100	100	100	99,97	100	100	
4	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	100	100	100	99	99	100	100	
6	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Jumlah Materai untuk Kegiatan Jasa Surat Menyurat		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
1	Jumlah Kendaraan yang terpeliharaan ,Kendaraan yang Kena Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100	100	100	100	100	81	100	100	
2	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100	100	100	100		48	100	100	
3	Persentase cakupan Pelayanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik		100	100	100	100	100	99	100	100	
4	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100	99	100	100	
5	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan PPID Kota Prabumulih)		1	1	1	1	1	1	1	1	
6	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Jumlah Kegiatan Desmininasi /Colling Masyarakat)		1	1	1	1	1	1	1	1	

7	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Jumlah Kegiatan Website)			1	1	1	1	1	1	1	
8	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik(Jumlah Kegiatan Jasa Advetorial)			100	100	100	100	100	100	100	
9	Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Jumlah Kegiatan Cetak PKK)			100	100	100	99	99	100	100	
6	Jumlah Kegiatan Layanan Hubungan Media (Jumlah Kegiatan Orientasi /Bimtek Wartawan)			100	100	100	99	99	100	100	
1	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas		1	1	1	1	1	1	1	1	
2	Persentase Pelayanan Aplikasi Informatika		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	96,00	100	100	
5	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		7,86								
7	Terlaksananya Kegiatan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah (Kegiatan Perawatan Jaringan)		100	100	100	100	99	95	100	100	
8	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Kegiatan Colocation Sever LPSE)										
9	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan Informasi Elektronik (Kegiatan SIM PKK)			90			100	50			
10	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Kegiatan Jasa Pengelola LPSE)										

11	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (Kegiatan Pengawasan Menara)		100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (tersedianya Peserta Penyedia Barang dan Jasa untuk Sosialisasi Standarisasi LPSE kepada Penyedia)										
13	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (CGIO)		100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Terlaksananya Sosialisasi SPBE			100	100	100		100	100	100	
4	Ketersediaan Data/Informasi Statistik Daerah		100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Telaksananya Kegiatan Metadata Statistik Sektoral (Kegiatan Statistik)		100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Kegiatan Sosialisasi Satu Data)		100	100	100	100	100	99,96	100	100	
8	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			100	100	100	100	100	100	100	
8	persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	100	100	100	100	100	100	100	
1	terlaksananya Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah		100	100	100	100	100	90	100	100	
2	Terlaksananya Kegiatan Keamanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota		100	100	100	100	100	99	100	100	

Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Drs. Mulyadi Musa, Msi
NIP.197202211992011002

Isu-isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi SKPD

Sebelum mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, perlu disampaikan pelayanan-pelayanan umum yang dilakukan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memasukkannya kedalam program-program unggulan, yaitu :

1. Pelayanan diseminasi dan pendistribusian informasi yang *up to date* yang bisa diakses oleh masyarakat melalui media masa dan elektronik, media tradisional, website serta media interpersonal seperti sarasehan ceramah, diskusi dan lokakarya.
2. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugasnya (*Self Evaluation*). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Komunikasi dan Informatika. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Aspek Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Identifikasi dilakukan terhadap gambaran dan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.
2. Aspek Kajian terhadap Renstra Pemerintah Kota Prabumulih, Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan Renstra Kota Prabumulih
3. Aspek Kajian terhadap pola tata ruang kota Prabumulih RT/RW, telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (*geografis*) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RT/RW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT/RW tersebut. Dapat dijelaskan dalam table berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Yang Mempengaruhi		Permasalahn
			Internal	External	
Aspek Pelayanan SKPD	Baik	SPM Komunikasi Informatika	SDM dan Sarana	Perda dan Peraturan yang ada	Prasarana, SDM masih kurang dan Penegakan Hukum Penyebaran Informasi
Kajian Renstra Kota Prabumulih	Baik	Capaian renstra	SDM	Perda dan Peraturan yang ada	Peningkatan system komunikasi
Kajian RTRW	Kurang	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda dan Peraturan yang ada	Komunikasi

Identifikasi permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika dikasifikasikan berdasarkan perbidang yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika. permasalahan yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Belum memadai dan terbatasnya prasarana dan sarana Komunikasi dan Informatika di Kota Prabumulih
2. Belum tertatanya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika serta pelayanan yang masih terbatas dan belum memadai.
3. Rendahnya keterampilan dan keahlian teknis aparatur Komunikasi dan Informatika mengakibatkan sulitnya implementasi peraturan perundang-undangan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis yang muncul, selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (**Strenght, Weakneses, Oportunities dan Theats**). Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasi variabel internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi dalam menyikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (**Peluang dan Tantangan**) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (**kekuatan dan kelemahan**). Pada sisi lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan misi OPD periode 2018-2023. Identifikasi faktor – faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strenght) :

- Adanya tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mempunyai tugas pokok dan fungsi;
- Adanya **Standard Operating Procedure (SOP)**;
- Struktur organisasi yang jelas
- Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kelemahan (Weaknesses) :

- Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang Terampil dan Professional ;
- Sarana dan prasarana kurang memadai;
- Masih terbatasnya infrastruktur Jaringan Internet
- Belum Optimalnya Pengembangan Aplikasi TIK

Peluang (Opportunities)

- Kesadaran Masyarakat akan pentingnya informasi
- Tersedianya media Informasi dan Komunikasi untuk didayagunakan
- Adanya bantuan program / kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBD bantuan Pusat;
- Kerjasama antar instansi dan antar daerah;
- Pemanfaatan teknologi informasi.
- Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Kebutuhan Pengembangan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Ancaman (Treaths)

- Kesenjangan Informasi di Masyarakat
- Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan;
- Membangun dan Mengembangkan Aplikasi secara Mandiri oleh SDM Dinas Komunikasi dan Informatika
- Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah;
- Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata

Berdasarkan faktor – faktor tersebut dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor – faktor tersebut ke dalam matrix SWOT. Melalui **tabel 1.4**

identifikasi analisa faktor lingkungan internal dan eksternal berikut ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- ❖ Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar – besarnya;
- ❖ Strategi ST, yaitu dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman;
- ❖ Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada;
- ❖ Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Tabel 2.3 Identifikasi analisa faktor lingkungan internal dan eksternal

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL			
No	KEKUATAN (S)	No	KELEMAHAN (W)
S1	Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)	W1	Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang Terampil dan Professional ;
S2	Adanya Standard Operating Procedure (SOP);	W2	Sarana dan prasarana kurang memadai;
S3	Struktur organisasi yang jelas	W3	Masih terbatasnya infrastruktur Jaringan Internet
S4	Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	W4	Belum Optimalnya Pengembangan Aplikasi TIK
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL			
No	PELUANG (O)	No	ANCAMAN (T)
01	Kesadaran Masyarakat akan pentingnya informasi	T1	Kesenjangan Informasi di Masyarakat
02	Tersedianya media Informasi dan Komunikasi untuk didayagunakan	T2	Tingginya tuntutan peningkatan pelayanan;
03	Adanya bantuan program / kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi, APBD bantuan Pusat;	T3	Membangun dan Mengembangkan Aplikasi secara Mandiri oleh SDM Dinas Komunikasi dan Informatika
04	Kerjasama antar instansi dan antar	T4	Respon dari dinas/instansi terkait

	daerah;		lainnya masih lemah;
05	Pemanfaatan teknologi informasi.	T5	Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata

1. ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL

Analisa faktor lingkungan internal meliputi :

- Kekuatan
- Kelemahan

Kekuatan

a. Adanya tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika (Tupoksi)

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota .

b. Sudah tersedianya Standard Operasional Prosedure (SOP)

Keputusan Kepala Dinas Nomor 017.1/KPTS/DISKOMINFO/2017 tentang Standard Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Infromatika Kota Prabumulih telah memuat seluruh SOP terkait tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika..

c. Struktur Organisasi yang jelas

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu OPD yang terdapat pada Pemerintahan Kota Prabumulih telah memiliki Struktur Organisasi dan Tupoksi yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota .

d. Adanya dukungan anggaran untuk kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Seluruh kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih.

Kelemahan

a. Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang Terampil dan Professional ;

Kuantitas pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi saat ini masih sangat kurang Staf yang Skill di IT. Rata – rata perbidang hanya memiliki 2-3 staf, Hal ini sangat menyulitkan mengingat banyaknya pekerjaan yng harus diselesaikan. Dari sisi kualitas, Dinas Komunikasi dan Informatika masih memerlukan tambahan pegawai khususnya yang berlatar belakang pendidikannya di bidang TIK, KIP, Statistik dan Persandian.

b. Sarana dan Prasarana Belum Memadai

Sarana dan prasarana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih masih belum optimal dalam mendukung kelancaran penyelesaian kegiatan.

c. Masih terbatasnya infrastruktur Jaringan Internet

Untuk pembangunan daerah masih diperlukannya Infrastuktur Jaringan internet untuk keposok desa/kelurahan dan kecamatan kota Prabumulih secara merata.

d. Belum Optimalnya Pengembangan Aplikasi TIK

Pengembangan Aplikasi TIK Hal ini terkait erat dengan keterbatasan anggaran, jumlah personil, prasarana dan sarana.

2. ANALISA FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi :

- Peluang
- Ancaman

PELUANG

a. Kesadaran Masyarakat akan pentingnya informasi

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap Infrastuktur Informasi dan komunikasi akan Kota Prabumulih semakin meningkat guna mendukung Kemajuan visi misi Kota Prabumulih.

b. Tersedianya media Informasi dan Komunikasi untuk didayagunakan

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada sehingga masyarkat dapat mendayagunakan media informasi dan komunikasi.

c. Adanya Bantuan Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi, APBN

Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah yang terbatas sangat membutuhkan dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi

d. Adanya Kerjasama Antar Instansi dan Antar Daerah

Perkembangan Kota Prabumulih ke depan mengingat letak geografisnya yang sangat strategis, tentunya tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan daerah sekitar yang saling menguntungkan. Hal ini akan menjadi peluang yang sangat besar untuk dikembangkan demi kemajuan Kota Prabumulih.

e. Pemanfaatan Teknologi informasi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat, menjadi peluang tersendiri untuk dapat mengoptimalkan teknologi tersebut dalam rangka mengatasi segala permasalahan daerah.

ANCAMAN

a. Tingginya Tuntutan Peningkatan Pelayanan

Tingginya tuntutan peningkatan publik di Kota Prabumulih menjadi peluang Pemerintah Daerah untuk berupaya memenuhi tuntutan tersebut dengan melakukan beberapa peningkatan dan pengembangan pelayanan Informasi dan Komunikasi yang dilakukan pemerintah hingga ke tingkat kelurahan / desa dan kecamatan.

b. Kesenjangan Informasi di Masyarakat

Seiring dengan kebutuhan dan apresiasi masyarakat yang meningkat terhadap kebijakan pemerintah, tuntutan akan kinerja pelayanan juga mengalami perkembangan. Perlu antisipasi yang bijak dalam menyikapi tuntutan masyarakat yang sangat banyak yang terkadang seringkali sulit direalisasikan mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

c. Membangun dan Mengembangkan Aplikasi secara Mandiri oleh SDM Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam hal membangun mengembangkan aplikasi secara mandiri oleh SDM Dinas Komunikasi dan informatika dengan SDM yang sudah kompeten secara teknis mandiri(SDM sudah melakukan pelatihan dan bimbingan TI) dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia .membangun aplikasi online yang bisa diakses masyarakat.

d. Respon dari dinas/instansi terkait lainnya masih lemah;

Dinas /instansi terkait lainnya masih banyak yang belum mengerti akan pentingnya aplikasi dalam mempermudah administrasi pemerintahan. dikarenakan banyak SDM belum Mengerti akan teknis IT.

❖ VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Dalam rangka mewujudkan *good governance* salah satu prinsip yang harus dilaksanakan adalah memiliki visi strategis (*strategic vision*) dimana para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Prabumulih sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023.

Visi Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih tahun 2005-2025 adalah **PRABUMULIH SEJAHTERA DAN MANDIRI**.

Mengacu pada visi dalam RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2005-2025 visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Visi menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah cara pandang kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif. Pada tataran Pemerintah Daerah, Visi menunjukkan arah pembangunan daerah. Sehingga Visi merupakan cita-cita dan pandangan hidup jauh kedepan yang sangat visioner untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**“KOTA PRABUMULIH SEBAGAI KOTA PRIMA DAN BERKUALITAS
TAHUN 2023”**

Adapun beberapa strategi dan arah kebijakan yang telah disusun adalah :

1. Misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, berkualitas dan berprestasi.
2. Misi peningkatan Sumberdaya masyarakat yang berkualitas, berprestasi dan Religius pada setiap lini kehidupan .
3. Misi peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman yang ramah lingkungan serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang berkualitas
4. Misi pemeberdayaanmasyarakat dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan kerja /berusaha serta dengan memntapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal,inovasi produk dan jasa serta pengembangan industri kreatif

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Visi Misi Kepala daerah dengan Progran SKPD**

No	Program KDH	Permasalahan Pelayan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Visi : Kota Prabumulih sebagai kota Prima dan berkualitas Tahun 2023				
Misi 1 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik,berkualitas, berprestasi				
1.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Kompetensi SDM - Disiplin Pegawai	- Kemauan Aparatur - Kesejahteraan Aparatur - Sarana dan Prasarana Aparatur	- Adanya Pelatihan - Adanya Fasilitas Pakaian dinas - Adanya sarana dan prasarana
2.	Penataan Organisasi Penyelenggara pemerintah daerah	- Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Kurangnya anggaran - Perubahan harga satuan	- Kebijakan untuk meningkatkan penataan
Misi 2 : Peningkatan Sumberdaya Masyarakat yang berkualitas,berprestasi dan religus pada setiap lini kehidupan				
1.	Pengembangan Data Informasi	- Pengembangan Jaringan, Sistem Komunikasi dan Informasi	- Besarnya anggaran yang dibutuhkan - Kurangnya SDM yang kompetible - Perubahan sistem yang begitu cepat	- Pelatihan sudah tersedia - Sistem komunikasi dan informasi sudah tersedia

Misi 3 : peningkatan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan serta peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang berkualitas				
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	- Tidak adanya halte - Tidak ada terminal barang	- Anggaran dan lahan terbatas	- Kebutuhan halted an terminal
2.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	- Pengkajian dan Pengembangan system informasi	- Anggaran yang besar - SDM yang terbatas	- Kebijakan untuk pemanfaatan Teknologi informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih ikut berperan serta dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dengan cara merencanakan pembangunan yang mengacu pada indikator perdamaian dan fungsi pemerintah pada Fungsi Pelayanan Umum yaitu Fungsi Pemerintah Daerah Bidang Komunikasi, seperti table berikut :

Indikator Kinerja MDGs

No	Fungsi Pelayanan dan Fungsi Pemerintah Daerah	Indikator sebagai Tolak Ukur Kinerja
1.	Pelayanan Umum	
	Komunikasi dan Informatika	- Tingkat Perkembangan media lokal dalam penyebar luasan informasi perdamaian - Tingkat kompetensi media lokal dalam komunikasi perdamaian - Akses masyarakat korban konflik terhadap pelayanan pemerintah daerah

Secara umum, selama periode pembangunan lima tahun sebelumnya, kinerja pelayanan Dinas Pehubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sebagian layanan sudah mampu mencapai target layanan yang direncanakan, beberapa diantaranya justru melebihi target yang ada. Meskipun demikian, masih ada beberapa target pelayanan yang belum dapat dipenuhi dengan tuntas, dikarenakan beberapa kendala yang dialami, baik kendala yang berkaitan dengan keterbatasan SDM, sarana pendukung kerja, maupun kendala yang berasal dari pihak luar, termasuk dari masyarakat.

▪ **TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Tantangan dan peluang Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun adalah sebagai dijabarkan dibawah ini:

1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tingginya Kebutuhan Masyarakat Di Kota Prabumulih akan pemenuhan informasi yang cepat dan akurat telah diimbangi dengan pesatnya perkembangan Teknologi komunikasi informasi namun saat ini keterbatasnya pembangunan infrastruktur yang masih terfokus pada wilayah perkotaan mengakibatkan sulitnya pemenuhan kebutuhan akan informasi masyarakat perdesaan. dengan demikian sesuai dengan fokus pembangunan nasional dibidang komunikasi dan informatika dalam hal ini kementerian komunikasi dan informatika sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika telah mengambil kebijakan yang dituangkandalam renstra kementerian komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 yang berfokus kepada pembangunan sektor telekomunikasi, tata kelola internet. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Yaitu dengan semakin kompleks dan tingginya harapan masyarakat terhadap masalah Komunikasi dan informatika di Kota Prabumulih, maka kondisi SDM yang ada saat ini juga memerlukan peningkatan, baik dalam hal jumlah maupun dalam kualitas. Perlu penambahan jumlah dan berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan layanan SDM.

Berdasarkan hal diatas maka disimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih adalah :

1. Globalisasi informasi berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Belum meratanya Ketersediaan internet dan layanan TIK ke pelosok desa/kelurahan (masyarakat)
3. Menjebatani kesenjangan antar OPD dalam Pelayanan Pemerintah berbasis E-Goverment
4. Peranan TIK dalam Pembangunan sarana dan prasarana (aplikasi) untuk Kebutuhan Masyarakat (User)

5. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:

1. Masyarakat sangat mendambakan terhadap pelayanan dibidang Komunikasi dan Informatika mendapat perhatian dan penanganan yang optimal;

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana dibidang komunikasi dan informatika
3. Pemanfaatan perkembangan dan penertasi TIK untuk penyebaran informasi (Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi-LRA) hasil retribusi menara Telekomunikasi (PAD).
4. Adanya bermacam aplikasi pelayanan E-Gov yang dapat dikembangkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan informasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dalam pembangunan dan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi peran serta masyarakat dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha.
2. Mendorong pengembangan teknologi sebagai antisipasi perkembangan global yang begitu cepat.
3. Penyediaan Informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan penyelenggaraan komunikasi dan Informasi

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu upaya untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumber daya keuangan pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan pemerintah daerah.

Kesinambungan berbagai program dan kegiatan pembangunan tahun lalu harus dilaksanakan, hal ini didukung oleh mantapnya pola dan sasaran struktur anggaran yang baik yang dilakukan dalam anggaran induk maupun anggaran perubahan.

Beberapa langkah awal perubahan ini merupakan wujud dari keseluruhan gerak pemerintah diproyeksikan akan semakin memberi makna terhadap kualitas pelayanan publik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk turut serta dalam berbagai program pembangunan.

Review pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2023, dan Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian SKPD Dinas Komunikasi dan informatik Tahun 2023 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tabel 2.4

**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PRABUMULIH**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	TAHUN 2024 (TAHUN ANGGARAN)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	KOMINFO		Rp 2.646.254.628				Rp 3.493.359.672
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu	KOMINFO	100%	Rp 9.185.000	PAD		100%	Rp 25.000.000
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.500.000	PAD		1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.500.000	PAD		1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan LAKIP	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.185.000	PAD		1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp 10.000.000

2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp 2.133.271.678	PAD			Rp 2.236.614.672
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji Dan Tunjangan ASN	KOMINFO	1 Tahun	Rp 2.075.204.678	PAD		1 Tahun	Rp 2.175.204.672
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOMINFO	12 Bulan	Rp 53.410.000	PAD		12 Bulan	Rp 53.410.000
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOMINFO	1 dokumen	Rp 2.500.000	PAD		1 dokumen	Rp 4.000.000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	KOMINFO	1 dokumen	Rp 2.157.000	PAD		1 dokumen	Rp 4.000.000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp 25.200.000	PAD			Rp 25.200.000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	KOMINFO	12 Bulan	Rp 25.200.000	PAD		12 Bulan	Rp 25.200.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp -	PAD			Rp 60.000.000
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	KOMINFO			PAD		50 stel	Rp 60.000.000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	KOMINFO			PAD			

2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp 359.597.950	PAD			Rp 699.745.000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOMINFO			PAD	(pengadaan Drone, 2 Laptop,2 PC, Printer,2 scan, 3 Lemari besi)		Rp 150.000.000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	KOMINFO	12 Bulan	Rp 9.080.000	PAD	12 Bulan		Rp 35.000.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	KOMINFO	5 Jenis Cetakan	Rp 15.182.950	PAD	5 Jenis Cetakan		Rp 30.000.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baca Perundang-undangan	KOMINFO	5 Surat Kabar	Rp 4.745.000	PAD	5 Surat Kabar		Rp 14.745.000
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Materai	KOMINFO	50 jenis ATK	Rp 19.870.000	PAD	50 jenis ATK		Rp 40.000.000

2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	KOMINFO	12 Bulan	Rp 10.720.000	PAD		12 Bulan	Rp 30.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOMINFO	12 Bulan	Rp 300.000.000	PAD		12 Bulan	Rp 400.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOMINFO		Rp -				Rp 120.000.000
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOMINFO			PAD	4 unit (Motor)		Rp 120.000.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO		Rp 1.800.000	PAD		100%	Rp 1.800.000
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai untuk Kegiatan Jasa Surat Menyurat	KOMINFO	300 materai	Rp 1.800.000	PAD	300 materai		Rp 1.800.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO		Rp 117.200.000	PAD		100%	Rp 325.000.000

2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang terpeliharaan ,Kendaraan yang Kena Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOMINFO	7 kendaraan	Rp 107.200.000	PAD		7 kendaraan	Rp 275.000.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KOMINFO	1 Tahun	Rp 10.000.000	PAD		Pemeliharaan Peralatan kantor (AC, Laptop dll) 1 Tahun	Rp 50.000.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan Pelayanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik	KOMINFO		Rp 2.359.762.800	PAD			Rp 2.475.000.000
												100%	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO		Rp 2.359.762.800	PAD			Rp 2.475.000.000
												100%	

2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan PPID Kota Prabumulih)	KOMINFO	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	PAD	2 Kegiatan	Rp 100.000.000
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Jumlah Kegiatan Desmininasi /Colling Masyarakat)	KOMINFO	1 kegiatan		PAD	1 kegiatan	Rp 30.000.000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Jumlah Kegiatan Website)	KOMINFO	2 Kegiatan (website dan pameran)	Rp 50.000.000	PAD	2 Kegiatan (website+pameran)	Rp 70.000.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik(Jumlah Kegiatan Jasa Advetorial)	KOMINFO	1 Kegiatan	Rp 2.000.000.000	PAD	1 Kegiatan	Rp 2.000.000.000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Jumlah Kegiatan Cetak PKK)	KOMINFO	1 Kegiatan/ 4 edisi		PAD	1 Kegiatan / 4 edisi	Rp 25.000.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kegiatan Layanan Hubungan Media (Jumlah Kegiatan Orientasi /Bimtek Wartawan)	KOMINFO	1 kegiatan	Rp294.762.800	PAD	1 kegiatan	Rp 250.000.000

2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Aplikasi Informatika	KOMINFO		Rp 1.297.321.494	PAD			Rp 1.344.159.192
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan			Rp 1.164.159.994				Rp 1.164.159.192
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	KOMINFO	1 kegiatan	Rp 1.164.159.994	PAD		12 Bulan	Rp 1.164.159.192
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO		Rp 133.161.500	PAD			Rp 180.000.000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	KOMINFO	1 kegiatan		PAD		1 kegiatan	

2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah (Kegiatan Perawatan Jaringan)	KOMINFO	1 kegiatan	Rp 20.000.000	PAD	12 Bulan	Rp 50.000.000
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Kegiatan Colocation Sever LPSE)						
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan Informasi Elektronik (Kegiatan Sosialisasi dan Quit Count)		1 kegiatan	Rp 30.000.000		1 kegiatan	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Internet masuk desa Bantuan Gebernur)		1 kegiatan			1 kegiatan	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (Kegiatan Pengawasan Menara)		1 kegiatan			1 kegiatan	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (CGIO)		1 kegiatan	Rp 51.333.000		12 Bulan	Rp 70.000.000
2	16	03	2.02	12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Sosialisasi SPBE		1 Kegiatan	Rp 31.828.500		12 Bulan	Rp 60.000.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Data/Informasi Statistik Daerah			Rp -			Rp 50.000.000

2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rp	-			Rp	50.000.000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Telaksananya Kegiatan Metadata Statistik Sektoral (Kegiatan Statistik)						1 Kegiatan yaitu : Kegiatan Data (dokumen) Prabumulih Dalam Angka	Rp	50.000.000
2	20	02	2.01	02	peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu statistik daerah yang intergrasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Kegiatan Sosialisasi Satu Data)								
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi			Rp	37.000.000			Rp	180.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp	37.000.000			Rp	180.000.000
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah						1 kegiatan	Rp	50.000.000
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Keamanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						1 kegiatan DAN 3 X PELATIHAN	Rp	70.000.000
2	21	02	2.01	05	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang yang distrelisasi oleh Dinas Kominfo pada Pemerintahan Kota Prabumulih (Jumlah Area Tingkat keamanan informasi pemerintah)			Rp	37.000.000		14 Ruang	Rp	60.000.000
					JUMLAH				Rp	6.340.338.922			Rp	7.542.518.864

Prabumulih, Januari 2025
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Prabumulih,



Drs. MULYADI MUSA, M, Si
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP.19720221199201100

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan tahun 2021 s/d sekarang , sesuai dengan tugas dan fungsi Diskominfo Kota Prabumulih. Khusus untuk Kota Prabumulih, kajian usulan program dan kegiatan untuk SKPD tingkat Kota, mengingat pemangku kepentingan Kota Prabumulih mencakup skala dan lingkup ruang yang lebih kecil dimana Pemerintahan Kota Prabumulih merupakan pemangku kepentingan yang sangat strategis.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD.

TABEL 2.5					
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU					
KEPENTINGAN TAHUN 2021 KOTA PRABUMULIH					
NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
NO	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	BESAR/VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA				
	Pengelolaan Internet dalam Kota	25 Kelurahan +1 Taman Prabujaya / 6 kecamatan	jaringan internet kecamatan dan kelurahan	230.000.000/Setahun	sedang berjalan

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota, SKPD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan Masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan tetapi ada juga sebagian lagi yang mengusulkan kegiatan pada SKPD Dinas teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha. Dinas Komunikasi dan Informatika kota prabumulih menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan TUPOKSI Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional (K/L) dan Kebijakan Provinsi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan cara atau metode tertentu untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan menjalankan misi serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, ditempuh melalui strategi pokok yaitu :

1. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pebisnis dan masyarakat.
2. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha.
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya.
4. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dalam pembangunan dan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi peran serta masyarakat dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha.
2. Mendorong pengembangan teknologi sebagai antisipasi perkembangan global yang begitu cepat.
3. Penyediaan Informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan penyelenggaraan komunikasi dan Informasi

Telaah terhadap Renstra K/L ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih terhadap sasaran Renstra Kementerian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian dan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumsel
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Kementerian maupun Renstra Propinsi.

Hasil review terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Diskominfo Kota Prabumulih tahun 2024-2026.

Tabel 01
**Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kota terhadap
 Sasaran Renstra SKPD Propinsi dan Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kota	Capaian Sasaran Renstra SKPD Propinsi	Capaian Sasaran Renstra K/L
	Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi	Terselenggaranya pengelolaan SDM yang optimal		Terciptanya kebijakan dan regulasi komunikasi dan informasi dalam penggunaan sumber daya yang optimal
		Penciptaan Sumber Daya Manusia yang unggul di bidang komunikasi dan informatika		
	Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Terselenggaranya layanan administrasi yang profesional		Terselenggaranya Komunikasi dan Informasi yang efisien dan optimal
		Pembinaan pengusaha dibidang komunikasi dan informatika		
	Pengembangan Aplikasi Informatika	Pengembangan komunikasi dan informatika		pembangunan sistem layanan pemerintahan (<i>e-Government</i>) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem <i>e-Government</i> an
		Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika		
	Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Tersebaranya Informasi yang factual keseluruh masyarakat		penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat

Sumber : Renstra Dinas Kominfo Tahun 2024-2026

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Misi 1 : Meningkatkan Kecukupan Informasi Masyarakat dengan Komunikasi yang Lancar dan Benar Tujuan : - Menyediakan Akses Komunikasi dan Informatika Sasaran : - Meningkatnya Pembangunan dan Prasarana Komunikasi dan Informatika - Meningkatnya Diseminasi Informasi - Terpenuhinya Pengkajian Komunikasi dan Informasi	1. Pemanfaatan Sumber Daya Komunikasi 2. Menyediakan dan Menyebarkan Informasi yang Bermanfaat 3. Pembentukan Klim Penyelenggaraan Layanan Komunikasi dan Informatika	1. Mendorong Pengembangan Teknologi 2. Penyediaan Informasi Pembangunan Daerah
2	Misi 2 : Mengembangkan Sistem Kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi Tujuan : - Meningkatkan Pengelolaan Informasi dalam Penyebarluasan Informasi Sasaran : - Terciptanya Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informasi	1. Mengembangkan Kemampuan sumber daya manusia	1. Peningkatan Kualitas SDM
3	Misi 3 : Mewujudkan Birokrasi Layanan Transportasi Komunikasi dan Informasi yang Profesional dan Memiliki Integritas Tujuan : - Menyediakan dan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Apartur Sasaran : - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran - Meningkatnya Kualitas Aparatur	1. Penataan dan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia	1. Penyediaan Layanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Kualitas SDM

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan mendukung pelaksanaan visi Pembangunan daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel TC-26						
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN 2024-2026						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
KOTA PRABUMULIH						
VISI : Prabumulih yang sejahtera dan mandiri						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	2	3	4	5		
MISI 4 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik						
1.1.	Mewujudkan Pemerintah Kota Prabumulih yang baik dan berprestasi, baik dari sisi pelaksanaan pemerintahannya maupun dari sisi pelayanan terhadap masyarakat.	1.1.1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan PD	1	Menyediakan dan meningkatkan pengelolaan administrasi dan kinerja Aparatur	melaksanakan fasilitasi terhadap 1 peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi 2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Komunikasi, Informasi, Statistik Sektoral dan Persandian 3 Meningkatkan Pelayanan Penyebaran Informasi /Data Pembangunan Daerah melalui website Pemerintah Kota
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi	1.2.1	terjangkauannya Akses Komunikasi dan Informatika	2	1. Meningkatkan Manajemen penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas 2. Menyediakan Akses Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	4. Meningkatkan SAKIP
		1.2.2	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Teknologi informasi dan komunikasi publik			5. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan diruang Publik
3	Meningkatkan layanan pengamanan Pemerintah Kota Prabumulih	1.2.3	meningkatnya kinerja sistem persandian daerah			6. Pemanfaatan Teknologi Informasi
4	Terwujudnya Layanan dan Dokumen Data Sektoral	1.2.4	meningkatnya Pengelolaan dan layanan statistik sektoral			7. Pengembangan Kompetensi ASN terkait dengan penerapan Pelayanan Prima

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 direncanakan berdasarkan :

1. Hasil Analisis dan Kondisi yang ada.
2. Usulan atau aspirasi masyarakat.
3. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2023
4. Efisien dan efisiensi anggaran.
5. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024-2026

Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2024 Dan perkiraan maju tahun 2025, secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

**RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA PRABUMULIH**

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	TAHUN 2024 (TAHUN ANGGARAN)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	KOMINFO		Rp 2.646.254.628				Rp 3.493.359.672
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu	KOMINFO	100%	Rp 9.185.000	PAD		100%	Rp 25.000.000
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.500.000	PAD		1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.500.000	PAD		1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan LAKIP	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.185.000	PAD		1 Dokumen	Rp 5.000.000
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOMINFO	1 Dokumen	Rp 2.000.000	PAD		1 Dokumen	Rp 10.000.000

2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp 2.133.271.678	PAD			Rp 2.236.614.672
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji Dan Tunjangan ASN	KOMINFO	1 Tahun	Rp 2.075.204.678	PAD		1 Tahun	Rp 2.175.204.672
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KOMINFO	12 Bulan	Rp 53.410.000	PAD		12 Bulan	Rp 53.410.000
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KOMINFO	1 dokumen	Rp 2.500.000	PAD		1 dokumen	Rp 4.000.000
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	KOMINFO	1 dokumen	Rp 2.157.000	PAD		1 dokumen	Rp 4.000.000
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp 25.200.000	PAD			Rp 25.200.000
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	KOMINFO	12 Bulan	Rp 25.200.000	PAD		12 Bulan	Rp 25.200.000
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp -	PAD			Rp 60.000.000
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan	KOMINFO			PAD		50 stel	Rp 60.000.000
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	KOMINFO			PAD			

2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	KOMINFO		Rp 359.597.950	PAD			Rp 719.745.000
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOMINFO			PAD		(pengadaan Drone, 2 Laptop,2 PC, Printer,2 scan, 3 Lemari besi)	Rp 150.000.000
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	KOMINFO	12 Bulan	Rp 9.080.000	PAD		12 Bulan	Rp 35.000.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	KOMINFO	5 Jenis Cetak	Rp 15.182.950	PAD		5 Jenis Cetak	Rp 30.000.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baca Perundang-undangan	KOMINFO	5 Surat Kabar	Rp 4.745.000	PAD		5 Surat Kabar	Rp 14.745.000
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Materai	KOMINFO	50 jenis ATK	Rp 19.870.000	PAD		50 jenis ATK	Rp 40.000.000

2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	KOMINFO	12 Bulan	Rp 10.720.000	PAD		12 Bulan	Rp 30.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOMINFO	12 Bulan	Rp 300.000.000	PAD		12 Bulan	Rp 400.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOMINFO		Rp -				Rp 120.000.000
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KOMINFO			PAD		4 unit (Motor)	Rp 120.000.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO		Rp 1.800.000	PAD		100%	Rp 1.800.000
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai untuk Kegiatan Jasa Surat Menyurat	KOMINFO	300 materai	Rp 1.800.000	PAD		300 materai	Rp 1.800.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KOMINFO		Rp 117.200.000	PAD		100%	Rp 325.000.000

2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang terpeliharaan ,Kendaraan yang Kena Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KOMINFO	7 kendaraan	Rp 107.200.000	PAD		7 kendaraan	Rp 275.000.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	KOMINFO	1 Tahun	Rp 10.000.000	PAD		Pemeliharaan Peralatan kantor (AC, Laptop dll) 1 Tahun	Rp 50.000.000
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan Pelayanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik	KOMINFO		Rp 2.359.762.800	PAD			Rp 2.475.000.000
												100%	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO		Rp 2.359.762.800	PAD			Rp 2.475.000.000
												100%	

2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan PPID Kota Prabumulih)	KOMINFO	1 Kegiatan	Rp 15.000.000	PAD	2 Kegiatan	Rp 100.000.000
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Jumlah Kegiatan Desminisasi /Colling Masyarakat)	KOMINFO	1 kegiatan		PAD	1 kegiatan	Rp 30.000.000
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Jumlah Kegiatan Website)	KOMINFO	2 Kegiatan (website dan pameran)	Rp 50.000.000	PAD	2 Kegiatan (website+pameran)	Rp 70.000.000
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik(Jumlah Kegiatan Jasa Advetorial)	KOMINFO	1 Kegiatan	Rp 2.000.000.000	PAD	1 Kegiatan	Rp 2.000.000.000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Jumlah Kegiatan Cetak PKK)	KOMINFO	1 Kegiatan/ 4 edisi		PAD	1 Kegiatan / 4 edisi	Rp 25.000.000
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kegiatan Layanan Hubungan Media (Jumlah Kegiatan Orientasi /Bimtek Wartawan)	KOMINFO	1 kegiatan	Rp294.762.800	PAD	1 kegiatan	Rp 250.000.000

2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Aplikasi Informatika	KOMINFO		Rp 1.297.321.494	PAD			Rp 1.344.159.192
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan			Rp 1.164.159.994				Rp 1.164.159.192
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	KOMINFO	1 kegiatan	Rp 1.164.159.994	PAD		12 Bulan	Rp 1.164.159.192
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOMINFO		Rp 133.161.500	PAD			Rp 180.000.000
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	KOMINFO	1 kegiatan		PAD		1 kegiatan	

2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah (Kegiatan Perawatan Jaringan)	KOMINFO	1 kegiatan	Rp 20.000.000	PAD		12 Bulan	Rp 50.000.000
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Kegiatan Colocation Sever LPSE)							
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan Informasi Elektronik (Kegiatan Sosialisasi dan Quit Count)		1 kegiatan	Rp 30.000.000			1 kegiatan	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Internet masuk desa Bantuan Gubernur)		1 kegiatan				1 kegiatan	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (Kegiatan Pengawasan Menara)		1 kegiatan				1 kegiatan	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (CGIO)		1 kegiatan	Rp 51.333.000			12 Bulan	Rp 70.000.000
2	16	03	2.02	12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Sosialisasi SPBE		1 Kegiatan	Rp 31.828.500			12 Bulan	Rp 60.000.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Data/Informasi Statistik Daerah			Rp -				Rp 50.000.000

2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Rp	-				Rp	50.000.000
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Telaksananya Kegiatan Metadata Statistik Sektoral (Kegiatan Statistik)							1 Kegiatan yaitu : Kegiatan Data (dokumen) Prabumulih Dalam Angka	Rp	50.000.000
2	20	02	2.01	02	peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu statistik daerah yang intergrasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Kegiatan Sosialisasi Satu Data)									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi			Rp	37.000.000				Rp	190.000.000
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp	37.000.000				Rp	190.000.000
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupater/Kota	terlaksananya Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah							1 kegiatan	Rp	60.000.000
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Keamanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							1 kegiatan DAN 3 X PELATIHAN	Rp	70.000.000
2	21	02	2.01	05	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang yang distrelisasi oleh Dinas Kominfo pada Pemerintahan Kota Prabumulih (Jumlah Area Tingkat keamanan informasi pemerintah)			Rp	37.000.000			14 Ruang	Rp	60.000.000
					JUMLAH				Rp	6.340.338.922				Rp	7.573.518.864

Prabumulih, Januari 2025
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Prabumulih,



Drs. MULYADI MUSA, M, Si
Pembina Utama Muda. IV/c
NIP.19720221199201100

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Komunikasi dan Informatika, maka dalam menetapkan program kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pemerintah Kota Prabumulih yang tertuang VISI dan Misi RPJPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih, maka disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Perubahan program dan kegiatan diatas mengacuh kepada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019** tentang Klasifikasi ,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah untuk Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang direncanakan Periode Tahun 2024-2026. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 1.1.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 1.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
 - 1.2.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantot
 - 1.2.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 1.2.4 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - 1.2.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.2.6 Penyediaan Bahan/Material
 - 1.2.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.2.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.3 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.3.2 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.3.4 Evaluasi kinerja perangkat daerah
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 1.4.2 Pendidikan dan pelatihan formal
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.7.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program informasi dan komunikasi publik

2.1 pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota

2.1.1 monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah

2.1.2 pengelolaan media komunikasi publik

2.1.3 penyelenggaraan hubungan masyarakat media dan kemintraan komunitas

2.1.4 Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik

2.1.5 Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik

2.1.6 Pelayanan informasi publik

2.1.7 Layanan hubungan media

3. Program Aplikasi Informatika

3.1 Pengelolaan E-Government dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

3.1.1 Pengelolaan Pusat data pemerintah daerah

3.1.2 Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten /kota cerdas da kota cerdas

3.1.3 Koordinasi dan sinkronisasi data informasi elektronik

3.1.4 Penyelenggaraan system penghubung layanan pemerintah

3.1.5 Pengelolaan government chief information officer (GCIO)

3.1.6 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah

3.1.7 Monitoring Evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE

3.1.8 Penyelenggaran Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah

3.2 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup pemerintah daerah

3.2.1 Penyelenggaran system jaringan intra pemerintah daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

4.1 Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten/kota

4.1.1 Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

5.1 Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

5.1.1 Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jarring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

5.1.2 Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

5.1.3 Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota

❖ PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih selama 1 tahun dari APBD Kota Prabumulih Tahun 2025 ditargetkan sebesar **Rp 7.542.518.864 (Tujuh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).** Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kota Prabumulih

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)	Target Akhir Priode Renstra 2026	Realisasi Kinerja Renja Tahun 2023	Target Renja Tahun 2023		Capaian Kinerja Renja Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
								Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	PD Penang gung Jawab
												Nasional	Daerah		
1	2	3	4	5	6a	6b	7=(5/6b*100%)	9	10	11	12	13	14	15	16
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 2.306.187.781		Rp 2.967.339.522	77,72		Rp 3.514.359.672	KOMINFO	PAD				
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tersedia tepat waktu	100%	Rp 9.185.000	100%	Rp 9.185.000	100,00	100%	Rp 25.000.000	KOMINFO	PAD				
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 2.500.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	100,00	1 Dokumen	Rp 5.000.000	KOMINFO	PAD				
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.500.000	1 Dokumen	Rp 2.500.000	100,00	1 Dokumen	Rp 5.000.000	KOMINFO	PAD				
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan LAKIP	1 Dokumen	Rp 2.185.000	1 Dokumen	Rp 2.185.000	100,00	1 Dokumen	Rp 5.000.000	KOMINFO	PAD				
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 2.000.000	1 Dokumen	Rp 2.000.000	100,00	1 Dokumen	Rp 10.000.000	KOMINFO	PAD				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jasa Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.810.451.341		Rp 2.133.141.672	84,87		Rp 2.237.614.672	KOMINFO	PAD				

2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Gaji Dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1.752.514.341	1 Tahun	Rp 2.075.204.672	84,45	1 Tahun	Rp 2.175.204.672	KOMINFO	DAU				
2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	Rp 53.280.000	12 Bulan	Rp 53.280.000	100,00	12 Bulan	Rp 53.410.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	Rp 2.500.000	1 dokumen	Rp 2.500.000	100,00	1 dokumen	Rp 5.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 dokumen	Rp 2.157.000	1 dokumen	Rp 2.157.000	100,00	1 dokumen	Rp 4.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp 19.200.000		Rp 25.200.000	76,19		Rp 25.200.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Bulan	Rp 19.200.000	12 Bulan	Rp 25.200.000	76,19	12 Bulan	Rp 25.200.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 24.455.000		Rp 25.174.000	97,14		Rp 60.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	50 stel	Rp 24.455.000	50 stel	Rp 25.174.000	97,14	50 stel	Rp 60.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan		-		\	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 349.891.140		Rp 390.798.850	89,53		Rp 719.745.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Keg	Rp 50.485.000	1 Keg	Rp 67.273.850	75,04	2 laptop, 2 PC, 3 Scan, 1 Drone, 4 Lemari Besi dan 1 Printer	Rp 150.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp 19.606.300	12 Bulan	Rp 19.970.000	98,18	12 Bulan	Rp 35.000.000	KOMINFO	PAD				

2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis Cetak	Rp 4.153.000	5 Jenis Cetak	Rp 17.328.000	23,97	5 Jenis Cetak	Rp 30.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baca Perundang-undangan	5 Surat Kabar	Rp 5.395.000	5 Surat Kabar	Rp 14.745.000	36,59	5 Surat Kabar	Rp 14.745.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	50 jenis ATK	Rp 16.987.500	50 jenis ATK	Rp 17.000.000	99,93	50 jenis ATK	Rp 40.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	Rp 4.500.000	12 Bulan	Rp 4.500.000	100,00	12 Bulan	Rp 50.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	Rp 248.764.340	12 Bulan	Rp 249.982.000	99,51	12 Bulan	Rp 400.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp -		Rp 276.000.000	-		Rp 120.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit		1 unit	Rp 276.000.000	-	4 Kendaraan Motor	Rp 120.000.000	KOMINFO	PAD				

2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.800.000		Rp 1.800.000	100,00	100%	Rp 1.800.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai untuk Kegiatan Jasa Surat Menyurat	300 materai	Rp 1.800.000	300 materai	Rp 1.800.000	100,00	300 materai	Rp 1.800.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 91.205.300		Rp 106.040.000	86,01	100%	Rp 325.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang terpeliharaan ,Kendaraan yang Kena Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 kendaraan	Rp 91.205.300	6 kendaraan	Rp 106.040.000	86,01	7 kendaraan	Rp 275.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun		1 Tahun			Pemeliharaan Peralatan kantor (AC, Laptop dll) 1 Tahun	Rp 50.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	02		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan Pelayanan Penyediaan Informasi dan Komunikasi Publik		Rp 3.193.330.500		Rp 3.269.627.000	97,67	100%	Rp 2.475.000.000	KOMINFO	PAD				

2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 3.193.330.500		Rp 3.269.627.000	97,67	100%	Rp 2.475.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	02	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan PPID Kota Prabumulih)	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (Kegiatan PPID Kota Prabumulih)	1 Kegiatan	Rp 32.585.000	1 Kegiatan	Rp 35.000.000	93,10	1 Kegiatan	Rp 100.000.000	KOMINFO	PAD			
2	16	02	2.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Jumlah Kegiatan Desmininasi /Colling Masyarakat)	Jumlah Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah (Jumlah Kegiatan Desmininasi /Colling Masyarakat)	1 kegiatan	Rp 4.950.000	1 kegiatan	Rp 5.000.000	99,00	1 kegiatan	Rp 30.000.000	KOMINFO	PAD			
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Jumlah Kegiatan Website)	1 Kegiatan	Rp 103.684.500	1 Kegiatan	Rp 112.238.000	92,38	1 Kegiatan (website)	Rp 70.000.000	KOMINFO	PAD			
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Media Komunikasi Publik(Jumlah Kegiatan Jasa Advetorial)	1 Kegiatan	Rp 2.780.050.000	1 Kegiatan	Rp 2.843.000.000	97,79	1 Kegiatan	Rp 2.000.000.000	KOMINFO	PAD			

2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pelayanan Informasi Publik (Jumlah Kegiatan Cetak PKK)	1 Kegiatan/ 4 edisi	Rp 73.579.000	1 Kegiatan/ 4 edisi	Rp 74.389.000	98,91	1 Kegiatan (Rehab Media Center)	Rp 25.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kegiatan Layanan Hubungan Media (Jumlah Kegiatan Orientasi /Bimtek Wartawan)	1 kegiatan	Rp 198.482.000	1 kegiatan	Rp 200.000.000	99,24	1 kegiatan	Rp 250.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kegiatan		1 Kegiatan		#DIV/0!			KOMINFO	PAD				
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Aplikasi Informatika		Rp 1.093.430.796		Rp 1.243.917.994	87,90		Rp 1.344.159.192		PAD				
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 931.128.908		Rp 947.913.994	98,23		Rp 1.164.159.192	KOMINFO	PAD				
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 kegiatan	Rp 931.128.908	1 kegiatan	Rp 947.913.994	98,23	1 kegiatan	Rp 1.164.159.192		PAD				
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 162.301.888		Rp 296.004.000	54,83		Rp 180.000.000	KOMINFO	PAD				

2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 kegiatan		1 kegiatan	-	1 kegiatan		KOMINFO	PAD				
2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Sistem Komunikasi intra Pemerintah Daerah (Kegiatan Perawatan Jaringan)	1 kegiatan	Rp 5.231.788	1 kegiatan	Rp 8.300.000	63,03	1 kegiatan	Rp 50.000.000	KOMINFO	PAD			
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Kegiatan Colocation Sever LPSE)	1 kegiatan		1 kegiatan				KOMINFO	PAD				
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi data dan Informasi Elektronik (Kegiatan sosialisasi dan Quit Count)	1 kegiatan	Rp 105.409.000	1 kegiatan	Rp 120.000.000	87,84	1 kegiatan		KOMINFO	PAD			
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 kegiatan		1 kegiatan			1 kegiatan		KOMINFO	PAD			
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas (Kegiatan Pengawasan Menara)	1 kegiatan	Rp 8.755.000	1 kegiatan	Rp 10.000.000	87,55	1 kegiatan		KOMINFO	PAD			

2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (tersedianya Peserta Penyedia Barang dan Jasa untuk Sosialisasi Standarisasi LPSE kepada Penyedia)	1 kegiatan	-	1 kegiatan	0	-			KOMINFO	PAD				
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (CGIO)	1 kegiatan	Rp 28.904.100	1 kegiatan	Rp 29.740.000	97,19	1 kegiatan	Rp 70.000.000	KOMINFO	PAD				
2	16	03	2.02	12	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Sosialisasi SPBE		Rp 14.002.000		Rp 20.000.000	-	1 Kegiatan	Rp 60.000.000	KOMINFO	PAD				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kersediaan Data/Informasi Statistik Daerah		Rp 26.694.000		Rp 29.110.000	91,70		Rp 50.000.000	KOMINFO	PAD				
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Rp 26.694.000		Rp 29.110.000	91,70		Rp 50.000.000	KOMINFO	PAD				
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Telaksananya Kegiatan Metadata Statistik Sektoral (Kegiatan Statistik)	1 kegiatan	Rp 26.694.000	1 kegiatan	Rp 29.110.000	91,70	1 Kegiatan yaitu : Kegiatan Data (dokumen) Statistik prabumulih Dalam Angka	Rp 50.000.000	KOMINFO	PAD				

2	20	02	2.01	02	peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Kegiatan Sosialisasi Satu Data)					-			KOMINFO	PAD				
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Rp 100.196.420		Rp 115.000.000	87,13		Rp 190.000.000	KOMINFO	PAD				
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 100.196.420		Rp 115.000.000	87,13		Rp 190.000.000	KOMINFO	PAD				
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1 kegiatan	Rp 36.142.000	1 kegiatan	Rp 50.000.000	72,28	1 kegiatan	Rp 60.000.000	KOMINFO	PAD				
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Kegiatan Keamanan Pemerintahan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 kegiatan	Rp 5.000.000	1 kegiatan	Rp 5.000.000	-	2 kegiatan (Kegiatan Pemakaian Alat Jammer dan Kegiatan Pelatihan (Bimtek) 3 x Pelatihan)	Rp 70.000.000	KOMINFO	PAD				
2	21	02	2.01	05	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ruang yang distrelisasi oleh Dinas Kominfo pada Pemerintahan Kota Prabumulih (Jumlah Area Tingkat keamanan informasi pemerintah)		Rp 59.054.420		Rp 60.000.000	98,42	14 Ruang	Rp 60.000.000						
					JUMLAH					Rp 751.981.616			Rp 7.573.518.864						

Prabumulih, Januari 2024
Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Prabumulih,



Drs. MULYADI MUSA, M.Si
Pembina Utama Muda.IV/c
NIP.19720221199201100

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra 2024-2026 dalam mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota prabumulih. Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat tujuan dan sasaran, target indikator kinerja, program/ kegiatan serta pagu indikatif yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2025.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.